

SKRIPSI

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA
BAGI HASIL, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI
PAPUA**



Disusun oleh:

Gracecilia Paula Siwabessy

12170263

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2024

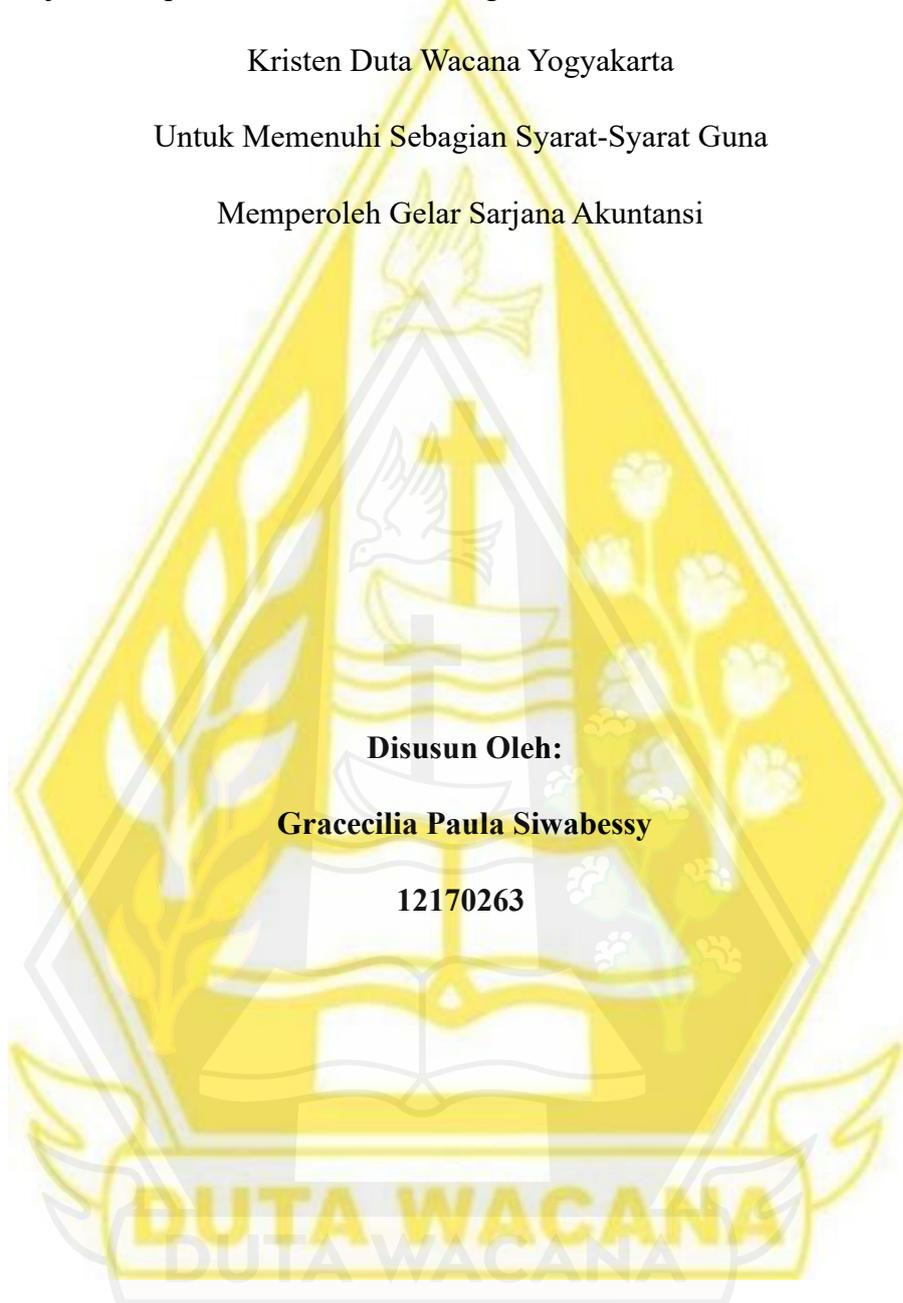
HALAMAN PENGAJUAN

Diajukan Kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas

Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun Oleh:

Gracecilia Paula Siwabessy

12170263

FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gracecilia Paula Siwabessy
NIM : 12170263
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua”

Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 Juni 2024

Yang menyatakan



(Gracecilia Paula Siwabessy)
12170263

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Papua”

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Gracecilia Paula Siwabessy

12170263

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

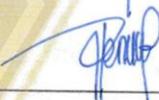
Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 3 Juni 2024

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Astuti Yuli Setyani, SE.,M.Si.,Ak.,CA.
(Dosen Penguji)
2. Albertus Hendri Listyanto Nugroho,S.E.,M.Sc
(Dosen Penguji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si.
(Ketua Tim Penguji dan Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 27 Juni 2024

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Ketua Program Studi Akuntansi



Rossalina Christanti, S.E.,M.Acc

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat demi menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta merupakan bukan hasil tiruan ataupun duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun. Kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya (terdapat dalam jurnal ini).

Apabila di kemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiarisme atau tiruan dari karya lain maka saya bersedia dikenai sanksi yakni pencabutan gelar sarjana saya.

Yogyakarta, 17 Mei 2024



Gracecilia Paula Siwabessy

12170263

HALAMAN MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku”

(Filipi 4:13)

“Bekerja dan berdoa”

(Papi & Mami)



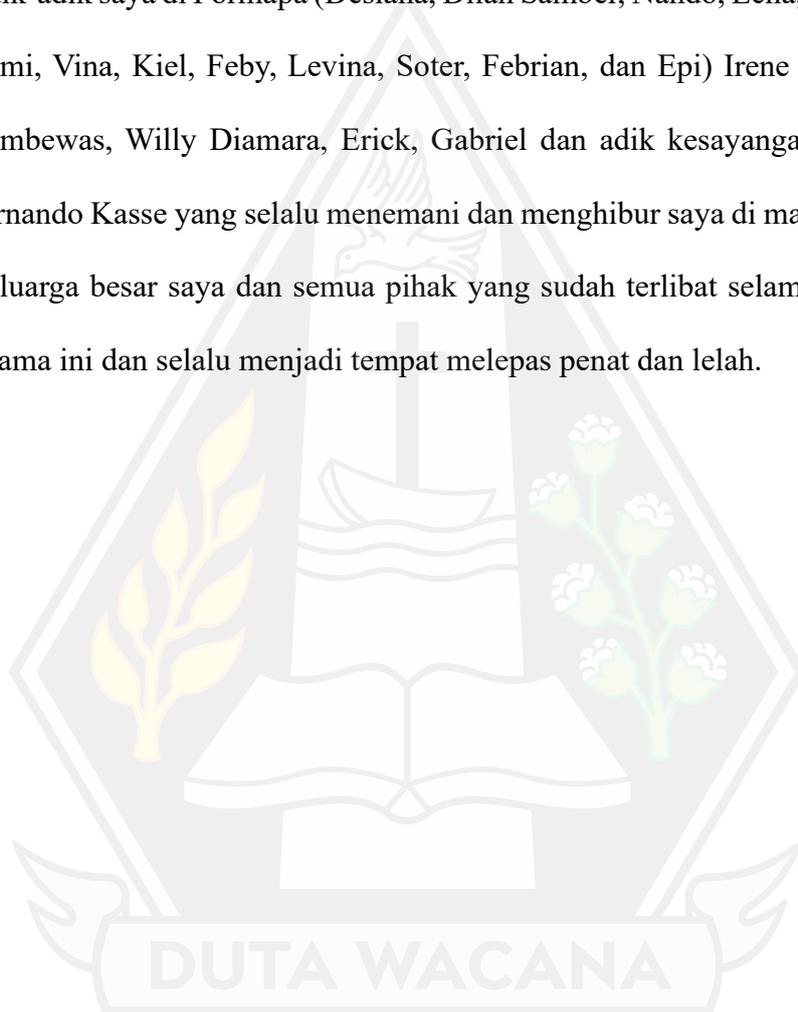
HALAMAN PERSEMBAHAN

Dari lubuk hati yang paling dalam, saya berterimakasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan membantu saya dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini. Berkat bantuan mereka saya dapat menulis skripsi ini dengan lancar dan dapat menyelesaikannya tepat waktu.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan membimbing saya dari awal perkuliahan sampai di titik penulisan skripsi untuk tugas akhir.
2. Mami dan papi yang sudah berjuang mencari nafkah untuk memberikan saya pendidikan dan kehidupan yang layak, memberikan dukungan dan semangat, dan selalu mengingatkan saya untuk tetap mengucap syukur dalam rintangan apapun.
3. Kakak kandung saya Rio Selvio Siwabessy dan Marlen Arisandy Siwabessy, kaka ipar saya Jimmy Rumbiak dan kaka saya Amuli Matuan yang selalu mengingatkan saya dan memberikan saya masukan dalam mengerjakan skripsi.
4. Ibu Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih M.si selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar membimbing dan memberikan banyak ilmu baru kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta.
6. Sahabat saya Renata T.N.O Atururi, Ester Enggeline Manaping, Glen Galstaun, Marcel M.C Latuheru, Hernand Lawene, Wasti Aprilia Bedes, dan Riry Fernandez yang sudah banyak mendukung dan memberi semangat kepada saya selama proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir.

7. Teman-teman saya dari kecil Marice M.A Tajo, Airin C.A Laodini, Herlina B. Hendrik, dan Flora V. Yansip yang selalu mendoakan saya.
8. Teman-teman seperjuangan saya selama menjalani dunia perkuliahan khususnya Naomi, Jhuan, Jemry, dan teman-teman Perkam Bcamp 2017 – 2022 yang selalu menjadi rumah untuk tempat mengadu.
9. Adik-adik saya di Formapa (Desiana, Dilan Samber, Nando, Echa, Olivia, Kiko, Mimi, Vina, Kiel, Feby, Levina, Soter, Febrian, dan Epi) Irene Merani, Feby Rumbewas, Willy Diamara, Erick, Gabriel dan adik kesayangan saya Yosua Fernando Kasse yang selalu menemani dan menghibur saya di masa-masa sulit.
10. Keluarga besar saya dan semua pihak yang sudah terlibat selama proses saya selama ini dan selalu menjadi tempat melepas penat dan lelah.



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar dan dapat melalui segala hambatan dan rintangan selama proses pengerjaan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua”**, sebagaimana diketahui, penyusunan penulisan skripsi ini diselesaikan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana.

Dalam proses penulisan penelitian, penulis menyadari bahwa setiap proses dari awal sampai akhir tidak mudah, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih M.Si, selaku dosen pembimbing yang mendampingi dan memberikan arahan dalam menyusun penelitian ini.

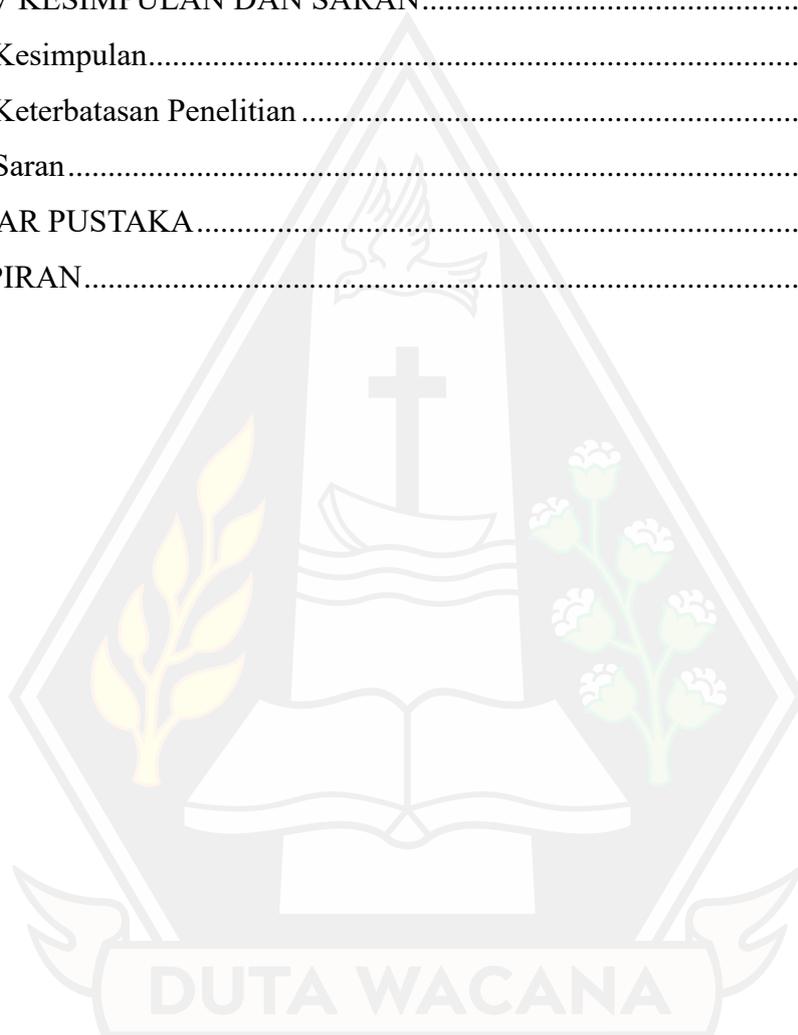
Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan penulisan penelitian ini, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan penelitian di masa mendatang. Penulis berhadap penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Komponen dan Tautan.....	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Batasan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori <i>Stakeholder</i>	11
2.1.2 Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah.....	12
2.1.3 Dana Alokasi Umum	15
2.1.4 Dana Alokasi Khusus.....	15
2.1.5 Dana Bagi Hasil.....	17
2.1.6 Dana Otonomi Khusus.....	18
2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Pengembangan Hipotesis	25

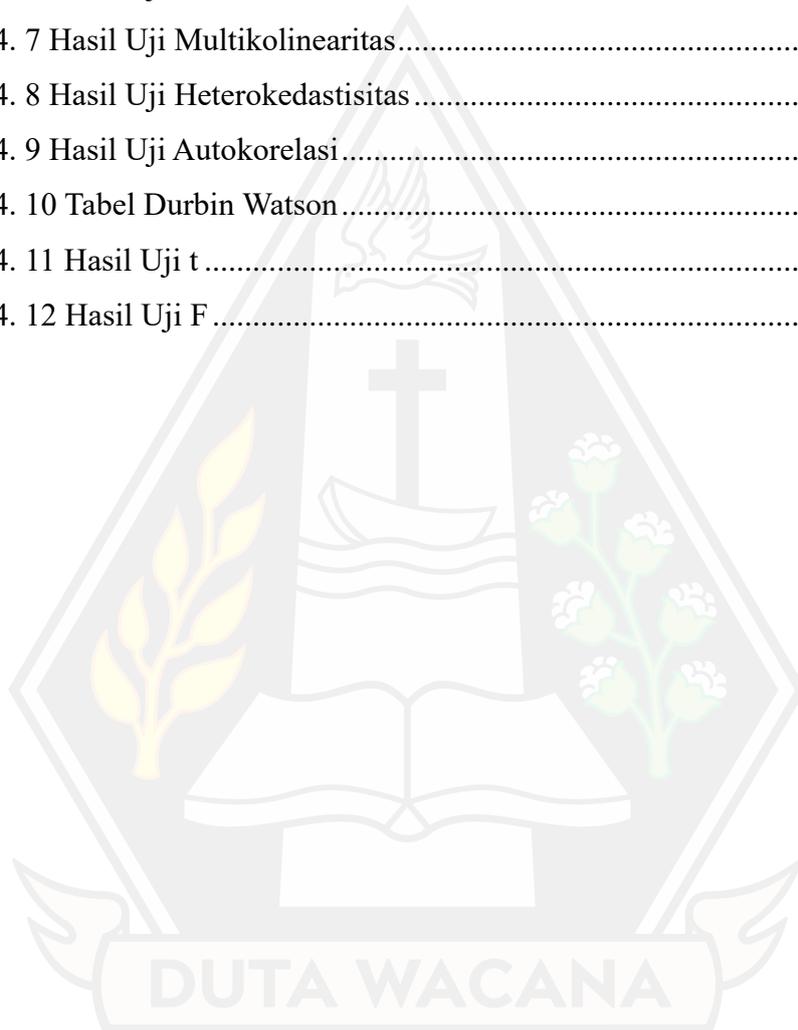
2.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	25
2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	26
2.3.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia ...	27
2.3.4 Pengaruh Dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Data dan Sumber	30
3.2 Definisi Variabel dan Pengukurannya	30
3.2.1 Variabel Dependen	31
3.2.2 Variabel Independen	31
3.3 Desain Penelitian.....	34
3.4 Model Statistik dan Uji Hipotesis	34
3.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.4.2 Analisis Data Panel	37
3.4.3 Uji Hipotesis	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Populasi Penelitian	43
4.2 Statistik Deskriptif.....	44
4.3 Analisis Regresi Data Panel	45
4.3.1 Uji Chow.....	46
4.3.2 Uji Hausman	48
4.4 Uji Asumsi Klasik	49
4.4.1 Uji Normalitas	50
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	50
4.4.3 Uji heterokedastisitas.....	51
4.4.4 Uji Autokorelasi.....	52
4.5 Uji Hipotesis.....	54
4.5.1 Uji t (Uji Signifikasi Parsial)	54
4.5.2 Uji F (Uji Signifikasi Simultan)	56
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)	57
4.6 Pembahasan	57

4.6.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia	57
4.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia	58
4.6.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia... ..	59
4.6.4 Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Keterbatasan Penelitian	63
5.3 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Tabel Deskriptif.....	44
Tabel 4. 2 <i>Common Effect Model</i>	46
Tabel 4. 3 Fixed Effect Model.....	47
Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow.....	47
Tabel 4. 5 Random Effect Model.....	48
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman.....	49
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4. 8 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	52
Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4. 10 Tabel Durbin Watson.....	53
Tabel 4. 11 Hasil Uji t.....	54
Tabel 4. 12 Hasil Uji F.....	56



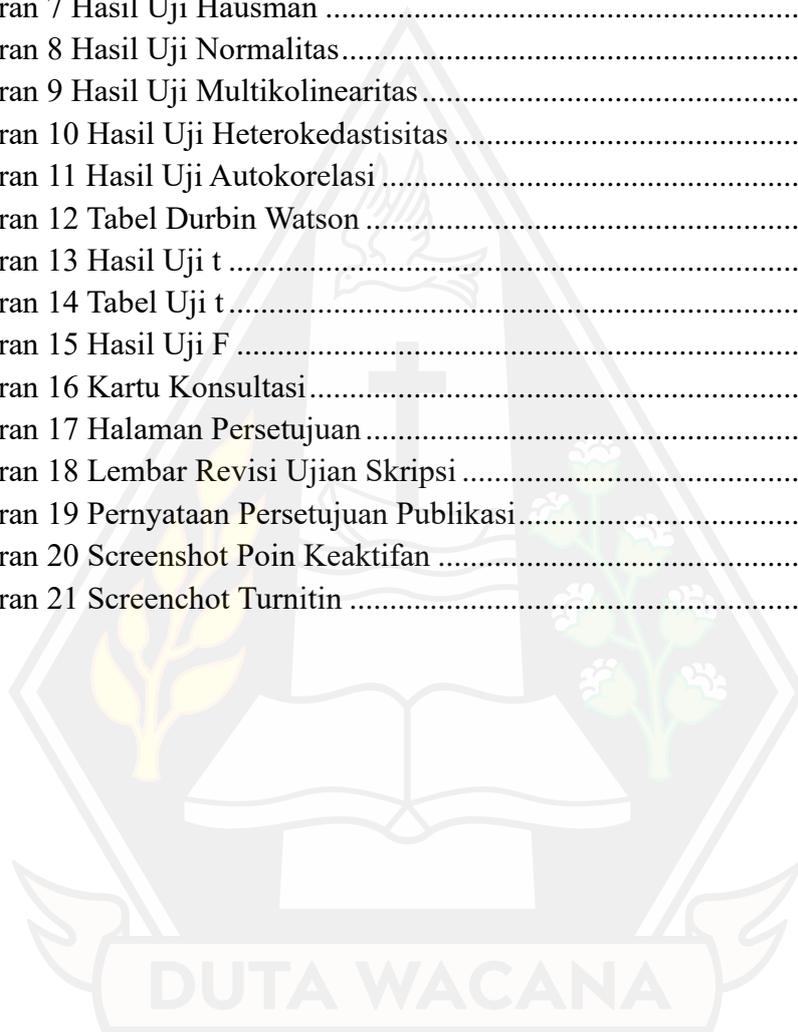
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komponen dan Tautan	8
Gambar 3. 1 Desain Penelitian.....	34
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data DAU, DAK, DBH, OTSUS, dan IPM Periode Tahun 2013-2023	68
Lampiran 2 Tabel Statistik Deskriptif.....	70
Lampiran 3 Common Effect Model.....	71
Lampiran 4 Fixed Effect Model.....	71
Lampiran 5 Hasil Uji Chow	72
Lampiran 6 Random Effect Model	72
Lampiran 7 Hasil Uji Hausman	73
Lampiran 8 Hasil Uji Normalitas.....	73
Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	73
Lampiran 10 Hasil Uji Heterokedastisitas	74
Lampiran 11 Hasil Uji Autokorelasi	74
Lampiran 12 Tabel Durbin Watson	74
Lampiran 13 Hasil Uji t	75
Lampiran 14 Tabel Uji t.....	75
Lampiran 15 Hasil Uji F	76
Lampiran 16 Kartu Konsultasi.....	76
Lampiran 17 Halaman Persetujuan	77
Lampiran 18 Lembar Revisi Ujian Skripsi	78
Lampiran 19 Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	79
Lampiran 20 Screenshot Poin Keaktifan	80
Lampiran 21 Screenshot Turnitin	81



PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA

**Gracecilia Paula Siwabessy
12170263**

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana

Email: gegepaula05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berarti informasi dikumpulkan oleh pihak lain dengan tujuan khusus dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Data sekunder yang diolah merupakan data yang dikumpulkan dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan sumber kepustakaan lainnya yang berasal dari pemerintah daerah provinsi Papua. Data merupakan gabungan data panel yang mencakup data silang (cross section), dan sampel dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data keuangan pemerintah kabupaten/kota provinsi Papua antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, dan Indeks Pembangunan Manusia selama 11 tahun dari tahun 2013. Diketahui bahwa IPM dipengaruhi oleh DAK, DBH, dan OTSUS dan memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Pengujian ini menunjukkan bahwa DAK, DBH, dan OTSUS memiliki pengaruh terhadap IPM sehingga setiap kenaikan dana tersebut akan meningkatkan IPM, sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap IPM sehingga setiap kenaikan DAU tidak menaikkan IPM.

Kata kunci: Provinsi Papua, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

THE INFLUENCE OF GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS, PROFIT SHARING FUNDS AND SPECIAL AUTONOMY FUNDS ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN DISTRICTS/CITIES OF PAPUA PROVINCE

Gracecilia Paula Siwabessy
12170263

Accounting Study Program, Faculty Business Duta Wacana University

Email: gegepaula05@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to identify and analyze whether the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Profit Sharing Fund, and Special Autonomy Fund influence the Human Development Index in Papua Province. The data in this research uses secondary data, which means information is collected by other parties with special purposes and classified according to their needs. The secondary data processed is data collected from the official website of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Central Statistics Agency, and other literature sources originating from the Papua provincial government. The data is a combination of panel data which includes cross section data, and the sample in this study is data taken from the financial data of the Papua provincial district/city government, including General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds, Special Autonomy Funds, and the Human Development Index for 11 years from 2013. It is known that HDI is influenced by DAK, DBH, and OTSUS and has a significant influence, while DAU does not have a significant influence on HDI. This test shows that DAK, DBH, and OTSUS have an influence on HDI so that every increase in these funds will increase HDI, while DAU has no influence on HDI so that every increase in DAU does not increase HDI.

Key words: Papua Province, General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Profit Sharing Fund (DBH), and Special Autonomy Fund (OTSUS), Human Development Index (IPM).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

United Nations Development Programme (UNDP) telah membuat dan mempopulerkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 1996 dan menerbitkannya dalam bentuk laporan tahunan yaitu *Human Development Report* (Senewe dkk., 2021). Pendapatan per kapita bukan satu-satunya indikator dalam menilai keberhasilan suatu negara, parameter lainnya yang dapat mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah negara yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, parameter penting untuk melakukan pengukuran terhadap keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas manusia dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia. IPM mengukur tiga dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Pertama, faktor usia dan masa hidup dihitung melalui rata-rata panjang umur atau ekspektasi usia. Kedua, tingkat pengetahuan diukur dengan skor rata-rata penduduk dewasa yang bisa membaca dan rata-rata lama pendidikan. Ketiga, aspek pendapatan diukur dengan menghitung pendapatan per kapita disesuaikan dengan daya beli (Patadang dkk., 2021). Peningkatan IPM tidak hanya bergantung pada perkembangan ekonomi, melainkan juga melibatkan sejumlah aspek lainnya. Pembangunan yang merata akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menjamin bahwa setiap penduduk bisa merasakan dampak dari realisasi pembangunan tersebut (Gde dkk., 2015).

Pada tahun 1999, terjadi reformasi di Indonesia yang menjadi titik awal pergeseran dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi fiskal yang lebih berkembang. UU Nomor 22 Tahun 1999 mengatur peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sedangkan UU Nomor 25 Tahun 1999 mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Revisi terbaru dilakukan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan penyaluran dana otonomi khusus ke Provinsi Papua, terjadi beberapa perubahan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008. Perubahan terakhir terjadi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan fokus pada tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk pendanaan pemerintahan, maka pemerintah pusat mentranfer dana kepada pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan. Transfer dana ke daerah merupakan salah satu aspek penerapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, yang bertujuan untuk membangun kerangka interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk meningkatkan cara bagaimana sumber daya

dialokasikan dan dimanfaatkan agar dapat lebih efisien dan efektif. Implementasi desentralisasi fiskal mengimplikasikan bahwa daerah harus memiliki kemampuan untuk membiayai semua pengeluaran daerah dengan menggunakan dana yang diterima dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu komponen penyusun APBD yaitu Transfer Ke Daerah (TKD) yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus, Dana Istimewa, dan Dana Desa.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan. DAU pada suatu daerah ditentukan berdasarkan celah fiskal (*fiscal gap*) daerah yang menjadi dasar perbedaan antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan kapasitas daerah (*fiscal capacity*). Dalam pelaksanaannya, DAU didistribusikan ke setiap daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga untuk mengurangi ketimpangan fiskal, karena tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama untuk mendanai setiap kegiatan. DAU juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan standar hidup serta menciptakan kondisi hidup yang lebih baik dan harapan hidup yang lebih tinggi (Zul Fadhly, 2018).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diberikan kepada daerah tertentu dengan maksud untuk membantu pendanaan kegiatan spesifik di daerah tersebut. Tujuan pemberian DAK yaitu untuk mendanai setiap kegiatan dan urusan

daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Dana ini disalurkan untuk kegiatan seperti investasi dalam pembangunan, pengadaan, peningkatan, serta perbaikan infrastruktur fisik yang memiliki masa pakai yang lama secara ekonomis. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat delapan bidang yang menjadi perhatian utama dalam pendanaan yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, infrastruktur irigasi, infrastruktur jalan, prasarana pemerintah desa, sarana dan prasarana kawasan perbatasan (Machmud & Radjak, 2018).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Penerimaan DBH berasal dari Sumber Daya Alam seperti pertambangan umum, kehutanan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan panas bumi, dan pertambangan gas bumi (Marheni & Triyanto, 2023). Pendapatan DBH yang bersumber dari pajak meliputi Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan pasal 25 (PPh 25), pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND). DBH diterapkan dengan mempertimbangkan sumbernya, yang berarti bahwa wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dan memiliki pemasukan pajak yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang besar juga. Penyaluran DBH baik melalui Sumber Daya Alam maupun melalui pajak dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus di suatu daerah. Pemahaman tentang otonomi khusus dikemukakan oleh Edie Toet Hendratno, bahwa pembagian wewenang dan pemberian kewenangan pemerintah di Undang-Undang Otonomi

Khusus mencerminkan prinsip subsidiaritas yang kuat (Kharisma dkk., 2020). Dana Otonomi Khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua (Muhtarulloh, 2021). Dana otonomi khusus dialokasikan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan Provinsi Papua melalui pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Desentralisasi asimetris yang berlaku di Indonesia membuat Papua menyandang status daerah dengan otonomi khusus. Selain itu, dana otonomi khusus diberikan kepada provinsi Papua karena pengelolaan dan penggunaan alam di tanah Papua belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga dana ini diperlukan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat di daerah tersebut. Dengan adanya dana ini, provinsi Papua diharapkan dapat mewujudkan standar hidup yang lebih baik dan dapat menikmati kesempatan layak hidup seperti daerah lainnya di Indonesia (Juliarini & Hatmoko, 2020).

Pengalokasian dana oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui dana Transfer ke Daerah (TKD) memiliki peran penting dalam upaya mendorong nilai IPM. Apabila pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatan daerah dan belanja daerah pada sektor-sektor yang penting yang menjadi komponen pembentukan nilai IPM maka secara otomatis dapat meningkatkan nilai IPM itu sendiri. Pemberlakuan desentralisasi membuat pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam menilai dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sehingga sumber daya tersebut dapat dialokasikan dengan tepat dan tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Provinsi Papua adalah salah satu provinsi yang menerima dana otonomi khusus dan juga dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Selaku daerah otonom, provinsi Papua berhak atas pengelolaan keuangan sepenuhnya dana otonomi khusus dan dana transfer ke daerah sebagai bentuk untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mereduksi kesenjangan fiskal (Machfud dkk., 2021). Namun, hasil dari pengalokasian dana yang diberikan kepada provinsi Papua belum direalisasikan dengan baik karena berbagai macam faktor. Berkaitan dengan masalah indeks pembangunan manusia, Provinsi Papua masih mengalami kesenjangan dalam meningkatkan kualitas hidup. Provinsi Papua memiliki kondisi geografis yang dikelilingi oleh pegunungan dan lautan sehingga menjadi tantangan dan kendala dalam pemeratakan kesejahteraan hidup. Hal ini disebabkan karena minimnya akses transportasi dan juga permasalahan infrastruktur, dan indeks kemahalan konstruksi yang sangat tinggi. Kondisi geografis menyebabkan pembangunan menjadi lebih lambat karena hanya dapat mengakses daerah-daerah terpencil dengan menggunakan transportasi udara dan lautan. Adapun daerah-daerah terpencil lainnya yang dapat diakses melalui jalur darat, namun tetap membutuhkan waktu yang cukup lama dengan medan yang cukup ekstrim. Selain itu, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi alasan provinsi Papua masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

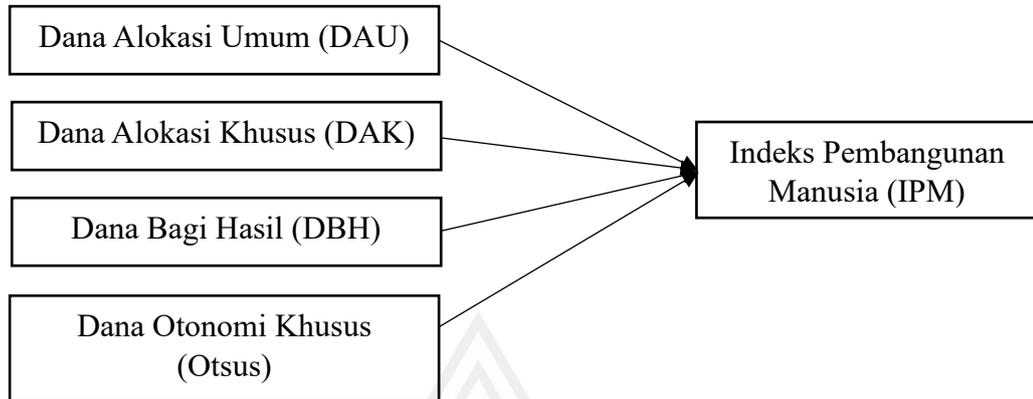
Berdasarkan data dari BPS, terjadi peningkatan IPM di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022, status pembangunan manusia di Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan 70,22. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang

“tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 24, dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Sejak tahun 2018, sudah tidak ditemukan lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah” setelah status pembangunan manusia di Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”. Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

Berdasarkan tiga dimensi pengukuran IPM pada tahun 2022, unuk dimensi Umur Harapan Hidup (UHH) rata-rata di Indonesia yaitu 71,85 sedangkan provinsi Papua hanya 66,23. Dimensi rata-rata harapan lama sekolah (HLS) rata-rata di Indonesia yaitu 13,10 sedangkan provinsi Papua hanya 11,14. Sedangkan dimensi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia yaitu 8,69 sedangkan provinsi Papua hanya 7,02. Walaupun pertumbuhan indeks manusia di provinsi Papua sudah meningkat menjadi sedang namun tetap menjadi provinsi dengan IPM terendah dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia.

Dengan uraian dari latar belakang diatas, penulis memiliki motivasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana perimbangan Provinsi Papua terhadap otonomi daerah yang merupakan indikator penting dalam mendorong kualitas daerah dan masyarakat, sehingga penulis bermaksud mengangkat judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua”**.

1.2 Komponen dan Tautan



Gambar 1. 1 Komponen dan Tautan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Papua?
- b. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Papua?
- c. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Papua?
- d. Apakah Dana Otonomi Khusus (Otsus) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Papua?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Papua.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupten/kota Provinsi Papua.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Papua.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Papua.

1.5 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa kontribusi yang diberikan oleh penelitian ini yaitu untuk:

- a. Bagi Akademis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pebanding untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
- c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan menambah pengalaman penelitian dilapangan tentang pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia.

1.6 Batasan Penelitian

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu umum dan menjadi lebih spesifik, maka penelitian dibatasi sebagai berikut:

- a. Penelitian ini mengambil sembilan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari provinsi Papua.
- b. Penelitian ini difokuskan pada dana transfer daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Variabel yang akan diteliti adalah variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua 2013-2023.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini yaitu DAU tidak memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap IPM sehingga kenaikan DAU tidak mampu menaikkan IPM di provinsi Papua. Dana Alokasi Umum digunakan oleh pemerintah provinsi Papua untuk memberikan kontribusi pada bidang belanja pegawai dan juga untuk meningkatkan kualitas perekonomian daerah, sehingga besar kecilnya dana alokasi yang diberikan kepada pemerintah Papua tidak akan berdampak pada naik turunnya Indeks Pembangunan Manusia.

DAK memiliki pengaruh signifikan dengan arah yang negatif sehingga setiap kenaikan DAK akan menurunkan IPM di provinsi Papua. Artinya, DAK kurang memberikan pengaruh besar dalam kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua. DAK seharusnya digunakan oleh pemerintah provinsi Papua secara khusus untuk meningkatkan pembangunan fasilitas publik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Namun, DAK dalam jumlah besar yang telah diterima oleh provinsi Papua ternyata belum memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia di Papua terus

mengalami peningkatan, IPM pada tahun 2013 sebesar 56,25 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 63,01. Namun dari hasil pengujian data menyatakan bahwa dana alokasi khusus memberi pengaruh negatif, berarti sasaran pengalokasian dana alokasi khusus belum mencapai tujuan dari penggunaan dana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari minimnya jumlah rumah sakit yang tersedia di setiap kabupaten, jumlah sekolah yang masih sedikit, serta masih banyak jalan transportasi yang masih kurang khususnya di daerah pedalaman Papua.

DBH dan mempunyai pengaruh signifikan dengan arah positif sehingga setiap kenaikan DBH akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia. Pemerintah provinsi Papua telah menggunakan dana yang bersumber dari pajak dan SDA dengan baik dan memperhatikan potensi pendapatan daerah agar dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Maka, setiap kenaikan dana bagi hasil yang diberikan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini terbukti dari terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2011 sampai tahun 2023, realisasi dari dana bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah provinsi Papua telah berkontribusi dengan baik pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang merupakan komponen dari pembentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Dana OTSUS mempunyai pengaruh signifikan dengan arah positif sehingga setiap kenaikan dana OTSUS akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia. Artinya, pemerintah sudah mengalokasikan dana otonomi khusus sesuai dengan fungsinya. Dana otonomi khusus ini diberikan kepada pemerintah provinsi Papua khusus untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata di setiap daerah di Papua. Dengan

meningkatnya IPM dari tahun 2011 sampai 2023 telah membuktikan bahwa pengalokasian dari dana otonomi khusus telah mengenai sasaran khususnya untuk meningkatkan kualitas hidup yang layak, meningkatkan angka harapan hidup, dan pengetahuan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada waktu penelitian, dikarenakan data yang diperoleh pada tahun-tahun tertentu sulit untuk didapatkan ataupun diakses melalui web, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan dana dari pusat ke daerah sesuai dengan tujuan pemberian dana tersebut. Pengoptimalkan penggunaan dana dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik seperti rumah sakit dan sekolah, di daerah terpencil dan perbaikan serta pembangunan jalan sampai ke pelosok daerah yang sulit untuk dijangkau.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu untuk melihat seberapa besar pengalokasian dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks

pembangunan manusia baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan yang layak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti lagi variabel yang digunakan dalam penelitian atau dapat menambah variabel bebas lainnya yang memiliki hubungan dengan indeks pembangunan manusia (IPM).



DAFTAR PUSTAKA

- Alvaro, R. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, DAN Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Daerah Tertinggal. *Jurnal Budget*, 7, 1–21.
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2, 105–113. <http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>].
- Arham, Muh. A. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Perubahan Struktur Ekonomi: Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi Dan Jawa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 18(4), 431–451. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.96>
- Arifin, A., & Azizah, S. N. (2022). Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1). www.bps.go.id
- Barzelay, M. (1991). Managing local development: lessons from Spain. *Policy Sciences*, 24(3). <https://doi.org/10.1007/BF00186330>
- Deca Pitron Lugastoro, & Candra Fajri Ananda. (2013). Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.
- Fahrudin, A. A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Pembangunan, E., & Brawijaya, U. (2022). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1, 1–16. <https://doi.org/10.21776/jdcss>
- Gde, P., Putra, M., Ketut, G., & Ulupui, A. (2015). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*.
- Handayani, H. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Dalam *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Juliarini, A., & Hatmoko, A. W. (2020). *Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Tanah Papua*. 1–20.
- Kharisma, V. D., Samputra, P. L., & Muntaha, P. Z. (2020). Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *Journal Publicuho*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11392>

- Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2019). Analisis Pengaruh DAU, Dak, dan Dbh terhadap Ipm di Kabupaten/kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016. *Dinamic*, 1(1), 100–113. <https://doi.org/10.31002/dinamic.v1i1>
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Marheni, R., & Triyanto, E. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Dalam *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah* (Vol. 2, Nomor 11). <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>
- Melgiana, A. C., Wayan Rupa, & Ni Putu Riasning. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1.
- Muhtarulloh, F. (2021). *Analisis Dampak Dana Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat Terhadap IPM* (Vol. 6, Nomor 1).
- Nashshar, M. I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Treasury Review*, 1–16.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5364>
- Noor, A., & Yulianti, A. (2018). *Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Indonesia Timur (Studi kasus Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua pada tahun 2013-2016)*.
- Panggabean, E. M. T. (2017). *Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi Papua Barat*.
- Patadang, T. M., Oldy Rotinsulu, T., Pingkan, I., & Rorong, F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minahasa Tenggara Dengan Pengeluaran di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. Dalam *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* (Vol. 22, Nomor 2).

- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 192–209. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5979>
- Pradana, E. Y., Jurnal, J., Akuntansi, I., & Keuangan, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Nur Handayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2>
- Program, H. S., Akuntansi, S., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Program, Z. (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). Dalam *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 1, Nomor 1). www.bps.go.id
- Sarkoro, H. (2016). Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). Dalam *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 1, Nomor 1). www.bps.go.id
- Senewe, J., Rotinsulu, Dc., Lopian, A., Senewe, J., Ch Rotinsulu, D., & LCP Lopian, A. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Minahasa Selatan Analysis of The Effect of Provery Levels, Government Expenditures, And Economic Growth on The Human Development Index in South Minahasa Regency. *Jurnal EMBA*, 9(3), 173–183.
- Sumarsono, Dr. H., & Novarinda, L. (2016). Potrait of Poverty and Related Categories Human Development Index (HDI) District/City in East Java (2005-2014). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 07(05), 01–08. <https://doi.org/10.9790/5933-0705020108>
- Syofya, H. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 177–185. <https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153>
- Zul Fadhly. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat (Studi Eksperimentasi Semu pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–15.
- Zulyanto, A. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24036/ecosains.346557.00>